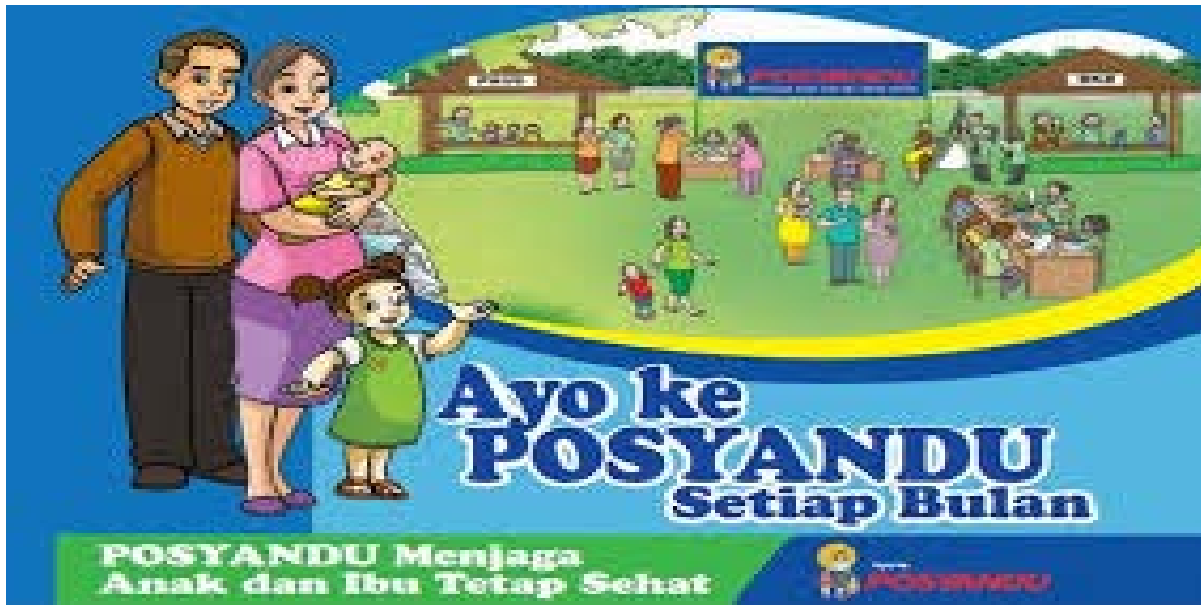


MENINGKATKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI GERAKAN POSYANDU



Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang menjadi milik masyarakat dan menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Posyandu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat serta mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA).

Jumlah Posyandu di Indonesia sebanyak 266.827 yang tersebar di seluruh Indonesia dan terdapat sekitar 3 sampai 4 orang kader per Posyandu dan berarti ada lebih dari 1 juta kader Posyandu. Berdasarkan data Riskesdas, hampir 78% penimbangan balita dilaksanakan di Posyandu.

Kondisi tersebut memperlihatkan peran penting dari kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat melalui Posyandu. Namun demikian, masih banyak kader yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Kader Posyandu sebaiknya mampu menjadi pengelola

Posyandu dengan baik karena merekalah yang paling memahami kondisi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Pengelola Posyandu merupakan orang yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu serta kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat. Oleh sebab itu, pelatihan bagi kader Posyandu merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader Posyandu. Kegiatan pelatihan kader Posyandu ini dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta maupun organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat luas termasuk dunia usaha.

Peran dan dukungan Pemerintah kepada Posyandu melalui Puskesmas dan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan kesehatan masyarakat di Posyandu. Peningkatan kapasitas Posyandu pada skala desa/kelurahan akan mendukung percepatan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yang merupakan salah satu target kinerja yang ingin dicapai dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang sudah menjadi milik masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Posyandu, selain berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat, juga untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA.

Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2011, sebanyak 268.439 Posyandu tersebar di seluruh Indonesia. Namun, bila ditinjau dari aspek kualitas, masih ditemukan banyak masalah. Antara lain, kelengkapan sarana dan keterampilan kader yang belum memadai, dimana kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.

Peran dan dukungan pemerintah kepada Posyandu melalui Puskesmas sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan kesehatan di Posyandu. Kegiatan Posyandu selama ini terlaksana dengan adanya peran masyarakat sebagai kader dengan bimbingan petugas kesehatan dan pihak lain terkait pemberdayaan

masyarakat. Kader Posyandu sebaiknya mampu menjadi pengelola Posyandu karena merekalah yang paling memahami kondisi kebutuhan masyarakat

Sasaran

Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, terutama:

- a. Bayi.
- b. Anak balita.
- c. Ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui.
- d. Pasangan usia subur (PUS).

Fungsi

- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB, dan AKBA.
- b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA.

Pengorganisasian

a. Struktur organisasi

Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu. Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan

bendahara serta kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota. Struktur organisasi bersifat fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.

b. Pengelola Posyandu

Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia

usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu. Kriteria pengelola Posyandu antara lain:

- 1) sukarelawan dan tokoh masyarakat setempat,
- 2) memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat,
- 3) bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.

c. Kader Posyandu

Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.

Tingkat perkembangan Posyandu

Tingkat perkembangan Posyandu dibedakan atas 4 tingkat sebagai berikut.

- a. **Posyandu pratama**, adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang.
- b. **Posyandu madya**, adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%.
- c. **Posyandu purnama**, adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu.
- d. **Posyandu mandiri**, adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu

Kegiatan Posyandu

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan. Secara garis besar, kegiatan Posyandu adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan utama

a. Kesehatan ibu dan anak (KIA)

- 1) Pelayanan untuk ibu hamil
- 2) Pelayanan untuk ibu nifas dan menyusui

b. Keluarga berencana (KB)

Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas, dapat dilakukan pelayanan suntikan KB dan konseling KB.

c. Imunisasi

Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan oleh petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program terhadap bayi dan ibu hamil.

d. Gizi

Pelayanan gizi di Posyandu adalah sebagai berikut.

- 1) Penimbangan berat badan.
- 2) Deteksi dini gangguan pertumbuhan.
- 3) Penyuluhan dan konseling gizi.
- 4) Pemberian makanan tambahan (PMT) lokal.
- 5) Suplementasi kapsul vitamin A dan tablet Fe.

e. Pencegahan dan penanggulangan diare

Pencegahan diare di Posyandu dilakukan dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare dilakukan dengan pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut, akan diberikan obat Zinc oleh petugas kesehatan.

Kegiatan pengembangan

Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila 5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik dalam arti cakupannya di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung.

Kegiatan pengembangan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang artinya adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga, dan kesejahteraan sosial

(Ni Kadek Widiastuti/ sie promkes Diskes Prov.Bali).